

***PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN MANAJEMEN KELAS TERHADAP HASIL BELAJAR IPS KELAS VIII DI SMPN 1 GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR***

**LINDA WARDANI’\*\***

Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar

e-mail: Lindawardani24@gmail.com

**ABSTRAK**

LINDA WARDANI Pengaruh Motivasi Belajar Dan Manajemen Kelas Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas VIII Di SMPN 1 Galesong Utara*.*(Dibimbing oleh Muchtar Yunus dan Thamrin Tahir.)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilakukan melalui pendidikan yang kemudian harus menjadi perhatian utama bagi guru, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Keberhasilan belajar seorang siswa ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor yang bearsal dari dalam diri (intern), maupun faktor dari luar (ekstern).

Tujuan penelitian ini adalah (I) Untuk menjelaskan keterkaitan asusiasi simestris antara motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS kelas VIII SMP Negeri 1 Galesong Utara Kabupaten Takalar. (ii) Untuk menjelaskan keterkaitan asusiasi simestris antara manajemen kelas terhadap hasil belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Galesong Utara Kabupaten Takalar. (iii) Untuk menjelaskan keterkaitan asusiasi simestris antara motivasi belajar danmanajemen terhadap hasil belajarips kelas VIII SMP Negeri 1 Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional dengan teknik pengumpulan melalui observasi, penyebaran angket dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif dan analisis statistik inferensial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS Kelas VIII SMPN 1 Galesong Utara yakni cukup baik (ii) terdapat pengaruh manajemen kelas terhadap hasil belajar IPS Kelas VIII SMPN 1 Galesong Utara yakni baik; (iii) terdapat pengaruh motivasi belajar dan manajemen kelas terhadap hasil belajar IPS Kelas VIII SMPN 1 Galesong Utara yakni baik.

.

**Kata Kunci : Motivasi Belajar, Manajemen Kelas, Hasil Belajar**

**ABSTRACT**

LINDA WARDANI, 2017. The Influence of Learning Motivation and Classroom Management towards IPS Learning Result of Class VIII at SMPN 1 in North Galesong ( supervised by Muchtar dan Thamrin Tahir)

The development of science and technology must be supported by qualified human resources. To obtain qualified human resources can be done through education which then should be a major concern for teachers, parents, communities and government. The success of a student's learning is determined by a variety of factors, both internal bearing factors, and external factors.

The study aims at explaning (i) the connection of symmtrical association between learning motivation and IPS learning result of class VIII at SMPN 1 in North Galesong, (ii) the connection of symmetrical association between classroom management and IPS learning result of class VIII at SMPN 1 in North Galesong, and, (iii) the connection of symmtrical association between learning motivation and clasroomm management towards IPS learning result of class VIII 1 in North Galesong.

 The study employed quantitative method with correlational approach. Data were colleted by employing observation, qeustionnaire dissemination, an documentation tecniques. Data were analyzed using statistic descriptive and statistic inferential analyses.

 The results of the study reveal that (i) there is influence of learning motivation towards IPS learning result of class VIII 1 in North Galesong which is in satisfactory category, (ii) there is influence of classroom management towards IPS learning result of class VIII 1 in North Galesong which is in good category, and (iii) there is influence of learning motivation and clasroom management towards IPS learning result of class VIII 1 in North Galesong which is in good category

**Kata Kunci** :

**PENDAHULUAN**

Pembangunan suatu daerah dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro ,2004:26).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan masyarakat. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah (kuncoro, 2004)

 Pemerintah menetapkan sebuah kebijakan daerah yaitu otonomi daerah yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pembaharuan dari UU No.22 Tahun 1999) yang telah diberlakukan sejak tahun 2001*.* Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim dan Iqbal,2012). Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksudkan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya yang pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah yang optimal, diperlukan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pembaharuan UU No.25 Tahun 1999) yang berisi transfer dari pemerintah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuagan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Halim dan Iqbal, 2012).

Penentuan besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Realisasi APBD yang merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah, akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian di daerah yang mencermin dalam Produk Domestik Regional Brruto (PDRB)

Salah satu cara untuk mengamati pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan melihat indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah (Sukirno,2006).

Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2006 : 168) maka jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap perekonomian daerah (Darise, 2006)

Berdasarkan UU No 32 dan 33 tahun 2004, tercapainya pembangunan di segala bidang terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi prasarana, pembangunan dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi daerah.

Pembangunan infrantruktur dan peningkatan kualitas jalan di 14 kecamatan belum terlaksana sepenuhnya, serta belum meratanya pendapatan daerah.

Pengeluaran pemerintah dalam setiap kegiatan perekonomian terwujud dalam berbagai pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah membangun dan memperbaiki instruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggaran pertahanan dan keamanan merupakan pengeluaran yang wajib yang dilakukan oleh pemerintah (sukirno,2006)

Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenang Provinsi atau Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Asas kemandirian dalam pengelolaan anggaran dijadikan dasar pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008).

Pemerintah daerah tentunya dapat lebih mandiri dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan tetap didasarkan pada fungsi pemerintah yaitu alokasi,distribusi dan stabilisasi perekonomian daerah. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 Pasal 6, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada dalam wilayah tersebut yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan faktor penting dalam hal pembangunan ekonomi karena dana ini berasal dari daerah itu sendiri dengan menggali sumber daya di daerah secara optimal sehingga memacu peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Table 1.1 Realisasi Belanja Daerah, PDRB dan Pendapatan asli daerah kabupaten maros

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi Belanja Daerah(Milyar Rp) | PDRB( atas dasar harga konstan) | Persen (%) |  |  |  Realisasi PAD | Persen (%) |
| 2009 | 226.946.00 | 6.508.525.770,00 | 5,43 % |  |  | 33.009.755.000,00 |  95 % |
| 2010 | 285.950.00 | 7.315.449.710,00 | 12,40 % |  |  | 36.154.442.225,00 |  91 % |
| 2011 | 350.938.91 | 8.137.588.410,00 | 11,24 % |  |  | 72.206.150. 265,00 |  93 % |
| 2012 | 417.857.13 | 9.044.514.020,00 | 11,14 % |  |  | 85.892.054.358,00 |  98 % |
| 2013 | 456.666.84 | 9.612.782.260,00 | 6,28 % |  |  | 91.602.396.004,00 |  81 % |
| 2014 | 495.668.79 | 10.115.956.400,00 | 5,32 % |  |  | 118.268.920.032,00 | 79 % |
| 2015 | 496.738.45 | 10.931.054.300,00 | 8, 58 % |  |  | 196.185.309.800,00 | 92 % |

*Sumber data : badan pusat statistik (BPS) 2009-2015*

Berdasarkan data yang ada dalam tabel 1.1 belanja daerah dari tahun 2009-2015 terus meningkat, terlihat aspek pendapatan dan belanja daerah APBD kabupaten Maros di era ekonomi daerahsaat ini sangat penting untuk dikaji mengenai besarnya permintaan dan belanja APBD sebab aspek belanja harus benar-benar dilakukan secara cermat dan tepat sasaran agar pembiayaan pembangunan terutama pembangunan instruktur di daerah kabupaten maros dapat terealisir sesuai dengan pendapatan dalam APBD.

Selain itu data dalam tabel 1.1 juga memperlihatkan secara jelas tentang produk domestic regional bruto kabupaten maros pada tahun 2009-2015 terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2009-2015 perekonomian kabupaten maros mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,80% pertahun.

Sektor pertanian merupakan sector yang masi dominan peranannya dalam struktur perekonomian kabupaten maros. Pada tahun 2015 kontribusi sector transportasi dan pergudangan terhadap total PDRB kabupaten maros sebesar 43,77%, disusul oleh sector industry pengolahan sebesar 18,27% dan sector pertanian sebesar 14,9% dan sector lainnya.

Pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian suatu daerah. Meskipun demikian peningkatan pengeluaran pemerintah belum tentu berakibat baik terhadap aktiva perekonomian. Oleh kerena itu perlu dilihat efesiensi penggunaan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang belanja daerah dan produk domestik regional bruto dengan judul Pengaruh Belanja Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros**.**

**METODE PENELITIAN**

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berdasarkan dimensi waktu, yaitu data *time-series* (runtut waktu) dengan menganalisis pengaruh belanja daerah dan produk domestic regional bruto terhadap PAD di Kabupaten Maros periode 2012-2016.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan data sekunder diperoleh dari publikasi Badan Pusat Satatistik Kabupaten Maros, serta publikasi yang relevan dengan penelitian ini.

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari dokumen atau laporan yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maros dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan literature yang terkait.Data yang diperlukan dalam penelitian adalah Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, di kabupaten Maros Sulawesi SelatanTeknikanalisis data yang digunakandalampenelitianiniadalah statistik inferensialyaituanalisisregresibergandadengan menggunakan Statistical Package For Science (SPSS) v For Windows sebagaimana yang dirumuskanolehGujaratih (2006) adalahsebagaiberikut :

Untuk menguji dan menganalisis belanja daerah dan PDRB yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros Sulawesi Selatan yang dipangkatkan serta menggunakan persamaan *multiple regression* dengan metode *panel data* (*fixed effect*) sebagai berikut:

PADMSit=    β0BDitβ1PDRBitβ2  μ1it…..…………………………..…(III.1)

Untuk memudahkan perhitungan model persamaan (III.1) maka persamaan tersebut diubah menjadi linear berganda dengan metode *double log* atau *logaritme natural (Ln)* sebagai berikut:

LnPADMSit=   β0+   β1LnBDit+  β2LnPDRBit…………..…………… (III.2)

Keterangan :

*BD* : Belanja Daerah (Rp)

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Rp)

β0  : intercep/konstanta

β1,…, β3 : koefisien regresi variabel bebas

PADMSit : Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros (Rp)

Untuk dapat mengukur pengaruh variable independen terhadap variabel dependen maka perlu dilakukan pengukuran dengan memakai alat analisis statistic.Pemakaian alat statistic diharapkan dapat mengungkap atau mengukur pengaruh variabel dependen secara kuantitatif himgga memudahkan peneliti dapat mengambil keputusan secara otentik.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Maros adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Belanja Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Data yang gunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dari laporan realisasi anggaran dan data PDRB (atas dasar harga konstan) Tahun 2012 sampai 2016. Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan Badan Pusat Statistik. Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis aplikasi SPSS v For Windows.

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi yang merangsang bagi berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar, Searah dengan kebijaksanaan pemerintah setelah mulai diterapkannya otonomi daerah kabupaten/kota sejak tahun 2001, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih mendorong pembangunan, dan juga mempercepat pemulihan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat,atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tdak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Maros dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan perkembangannya di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Maros.

Pemerintah Kabupaten Maros berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, sehingga dapat mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat dalam membiayai setiap kegiatan pembangunan yang ada di Kota Sinjai, Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah berusaha menggali secara maksimal potensi yang dimiliki oleh daerah sebagai sumber keuangannya,

Sumber-sumber PAD Kabupaten Maros yang dapat dipungut berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Retribusi Daerah meliputi :
3. Dinas Pendapatan Daerah yaitu : Retribusi Penginapan/Villa
4. Dinas Kesehatan yaitu : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
5. Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros yaitu : Retribusi Pelayanan JKN, Retribusi Pelayanan JAMKESDA, Retribusi Pelayanan Umum, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Rumah Sakit
6. Dinas Perhubungan yaitu : Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek
7. Dinas KOPERINDAG yaitu : Retribusi Pelayanan Pasar (Kios Pasar)
8. Dinas PTSP dan Penanaman Modal yaitu : Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telkom, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin HO
9. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan yaitu : Retribusi Pemakaian Asset Daerah, Retribusi Pemakaian Sewa Alat Berat, Retribusi Pelelangan Ikan, Retribusi Tempat Parkir Khusus TPI, Retribusi Penjualan Bibit Ikan, Retribusi Pemeriksaan, Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Badan Hewan dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah
10. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan yaitu : Retribusi Taman Wisata Bantimurung, Retribusi Taman Prasejarah Leang-Leang dan Retribusi Tempat Khusus Parkir
11. Dinas Pekerjaan Umum yaitu : Retribusi Sewa Alat-Alat Berat
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan yaitu : Penjualan Hasil Kehutanan
13. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meliputi : Bagian Laba yang Dibagikan kepada PEMDA atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD.
14. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu : Jasa Giro Daerah, Kerugiaan Uang (BPKD), Pendapatan dan Pengembalian, Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan, Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah lainnya, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) dan Dana Kapitasi JKN dan FKTP.

Berdasarkan jenis-jenis sumber PAD di Kabupaten Maros yang dapat diperolah seperti yang telah diuraikan, maka berikut ini tabel total sumber PAD selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2012-2016.

 Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012-2016

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **P A D** |
| **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 2012 | 70.338.150.000 | 60.364.408.988 | 85,82 |
| 2013 | 102.732.500.000 | 79.513.862.571 | 77,40 |
| 2014 | 150.022.399.954 | 118.267.910.133 | 78,83 |
| 2015 | 196.185.309.800 | 141.487.685.605 | 72,12 |
| 2016 | 176.118.724.400 | 165.023.868.628 | 93,70 |

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maros*

1. **Belanja Daerah**

Definisi Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (Badan Pusat Statistik,2010).

Jenis-jenis Belanja Daerah Kabupaten Maros berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi meliputi :belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social dan belanja bantuan keuangan.
2. Belanja Modal meliputi: tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya.
3. Belanja tidak terduga meliputi : belanja tidak terduga
4. Transfer bagi hasil ke desa meliputi : belanja tidak terduga.

Berikut ini data belanja daerah kabupaten Maros termasuk belanja operasi, modal, tidak terduga dan transfer bagi hasil ke desa selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2012-2016.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2016

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Belanja Daerah** |
| **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 2012 | 729.575.688.896 | 667.738.324.273 | 91,52 |
| 2013 | 929.246.171.956 | 871.051.679.383 | 93,74 |
| 2014 | 1.057.790.056.046 | 959.152.244.685 | 90,68 |
| 2015 | 1.121.243.844.950 | 1.075.948.396.088 | 95,96 |
| 2016 | 1.439.858.918.696 | 1.311.265.273.394 | 91,07 |

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maros, 2017*

1. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya [produk domestik bruto](https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto) (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari adminstrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut pendekatan produksi, unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi beberapa lapangan usaha (sektor) pada Kabupaten Maros, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan litrik dan gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keungan dan asuransi; Real Estate; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta jasa lainnya. (Badan Pusat Statistik)

Berikut ini tabel realisasi PDRB menurut harga konstan pada Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2012-2016.

Tabel 4.3 Realisasi Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga konstan) Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2016

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Produk Domestik Regional Bruto** |
| **Realisasi** |
| 2012 | 9.044.512.020 |
| 2013 | 9.612.262.470 |
| 2014 | 10.067.224.820 |
| 2015 | 10.931.054.310 |
| 2016 | 11.341.208.840 |

 *Sumber : Badan Pusat Statistik*

1. **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial yaitu analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk pengukur pengaruh/determinan antara satu variabel independent terhadap variabel dependent. Analisis ini menggunakan bantuan program bernama Statistical Package For Science (SPSS) v For Windows. Analisis regresi linier berganda menggunakan 2 (dua) variabel independent yaitu Belanja Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel Pengaruh Belanja Daerah dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel Independen | T.H | T. Hitung | Koefisien | VIF |
| Belanja DaerahProduk Domestik Bruto | ++ | * 4,778
* 4,023
 | * 2,909
* 0,788
 | * 1.012
* 1.012
 |
| Interprestasi |  | * t-Hitung > t-Tabel yaitu 4,778 > 1,672 dan nilai t bertanda positif dengan nilai sig. (X1)
* t-Hitung > t- Tabel yaitu 4,023 > 1,672 dengan nilai t berada positif dengan nilai sig (X2)
 | * 2,909 > 0,05 maka di dapat dikatakan signifikan jadi tidak ada gejala heterokedastistas (X1)
* 0,788 > 0,05 maka dapat dikatakan signifikan jadi tidak gejala heterokedastistas (X2)
 | 1.012 < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonearitas |
| F-hitung | 21,898 |
| Adjusted R Square | 0,415 |
| DW | 1,712 |

Analisis data setelah selesai diolah 2017

1. Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka digunakan uji Durbin-Watson (D-W). uji D-W dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% jumlah sampel 60 dan jumlah variable independent ada 2 (Dua).

dL = 1,514 dan dU = 1,651

Keterangan :

T = Jumlah Sampel n

K = Jumlah Variabel Independent

dL = Batas Bawah Durbin Watson

dU = Batas Atas Durbin Watson

Karena D-W terletak pada (du < d < 4 – du) = 1,651 < 1,712 < 2,349 maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif pada data yang diuji.

1. Adjusted R Square

Dari output model summary, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,434 (nilai 0,434 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu 0,659 x 0,659 = 0,434). Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0,434 sama dengan 43,4% angka tersebut mengandung arti bahwa Belanja Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 43,4% sedangkan sisanya (100%-43,4% = 56,6%) di pengaruhi oleh variable lainnya. Besarnya pengaruh variable lain ini sering disebut sebagai eror (e). untuk menghitung nilai eror dapat digunakan rumus e = 1 – R2. Sebagai catatan, besanya nilai koefisien determinasi atau R Square hanya antara 0-1. Sementara jika dijumpai R Square bernilai minus (-) maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. Semakin kecil nilai koefisien determinasi (R Square), maka ini artinya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R square semakin mendekati 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat.

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F (Uji Signifikan Simultan) digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini dilakukan dengan menggunakan hasil F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan α = 0,05.

Nilai F-Hitung = dan F-Tabel α;(k); (n-k-1) = 3,16

Keterangan :

k = jumlah variabel Independen (bebas)

n = jumlah responden atau sampel penelitian

α = tingkat signifikan atau kesalahan tertentu

Dari hasil uji F (Anova) didapatkan nilai F-hitung > F-tabel yaitu 21,898 > 3,16 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hal ini berarti belanja daerah dan produk domestik regional bruto secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan hasil t hitung dibandingkan dengan t tabel dengan α = 0,05

Dengan Nilai t-tabel (α; n-k-1) = 1,672

Uji Hipotesis

1. Hipotesis pertama adalah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai t hitung adalah 4,778 dan nilai t-tabel 1,672 dengan α = 0,05. Hal ini menunjukan bahwa t-hitung > t-tabel yaitu t-hitung 4,778> t-tabel 1,672 dan nilai t bertanda positif dengan nilai sig. lebih kecil dari 0,005 yaitu 0,000 menunjukkan bahwa Belanja Daerah (X-1) mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima yaitu Belanja Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.

Hipotesis kedua adalah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai t-hitung adalah 4,023 dan nilai t-tabel 1,672 dengan α = 0,05. Hal ini menunjukan bahwa t-hitung > t-tabel yaitu t-hitung 4,023> t-tabel 1,672 dan nilai t bertanda positif dengan nilai sig. lebih kecil dari 0,005 yaitu 0,000 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (X-2) mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima yaitu Produk domestik regional bruto berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.

**Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan pengujian regresi berganda, asumsi klasik dan uji hipotesis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada 2 (Empat) variabel yang diuji, yaitu Belanja Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel independen. Dari pengujian asumsi klasik, diketahui bahwa syarat-syarat pengujian asumsi klasik telah terpenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tesebut terdistribusi secara normal, tidak mengandung heteroskedastisitas, multikolineritas, dan autokorelasi. Pada uji ke dua variabel independent dapat masuk model regresi dan dapat dilakukan uji hipotesis. Pada pengujian hipotesis diketahui bahwa terdapat pengaruh Belanja Daerah dan Produk domestik regional bruto sebesar 41,5% terhadap Pendapatan Asli Daerah, kemudian pada uji F dan uji t didapatkan hasil bahwa semua variabel independen berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen.

1. **Analisis Belanja DaerahTerhadap Pendapatan Asli Daerah**

Belanja daerah menurut undang-undang No. 23 tahun 2002 adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahaan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten /kota yang tersiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah pada Kabupaten Maros terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta transfer bagi hasil ke desa. Belanja tersebut yang dikeluarkan oleh pemda mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini bisa dikatakan ada kemungkinan dengan dianggarkannya belanja daerah tersebut akan dapat memperbaiki infrastruktur, kualitas dan kinerja pegawai pemda yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Anggaran setiap belanja tersebut perlu tepat sasaran dan dikontrol supaya tidak diselewengkan sehingga dapat meningkatkan PAD dan pasti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan belanja yang efisien, efektif dan ekonomis agar belanja dapat maksimalkan fungsinya demi meningkatkan PAD. Ketika PAD disuatu daerah meningkat dan tinggi maka ketergantungan daerah dengan pusat akan menurut dan perwujudan daerah yang mandiri akan terwujud, ketika daerah mandiri dan dapat mengelola keuangan dengan baik maka masyarakat akan makmur dan sejahtera.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki nilai positif dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,005 yaitu 0,000.

Oleh karena itu, hipotesis awal dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti dan dapat diterima.

1. **Analisis Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Produk Domestik Regional Bruto adalah pendapatan total yang di peroleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh faktor-faktor produksi yang dimiliki asing, pengeluaran total atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Atau adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang di produksi dalam perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu.

Pertumbuhan produk domestik regional bruto di Kabupaten Maros terus mengalami kenaikan khususnya didominasi oleh sektor transportasi dan pergudangan, industri pengolaham serta pertanian, kehutanan dan perikanan (BPS Kabupaten Maros). Semakin berkembangnya usaha tersebut maka produk domestik regional bruto Kabupaten Maros akan mengalami peningkatan. Selain itu, seiring dengan peningkatan PDRB, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Artinya semakin besar produk domestik regional bruto yang diterima, maka semakin besar pula realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh suatu Kabupaten Maros. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa PDRB memiliki nilai positif dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,005 yaitu 0,000.

Oleh karena itu, hipotesis awal dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti dan dapat diterima.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang peneliti buat dan pengujian statistik bahwa Belanja daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros. Dalam hal ini disebabkan, antara lain Pemanfaatan belanja daerah yang efisien, efektif dan ekonomis sehingga meningkatkan kesejateraan masyarakat.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) positif berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang peneliti buat dan pengujian statistik bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros. Dalam hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Maros.
3. **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variable penelitian sehingga penelitian ini semakin sempurna dan beragam.
2. Perlunya memperluas objek penelitian yang tidak terbatas pada kabupaten Maros saja dengan menambah kabupaten lain sebagai sampel, sehingga memungkinkan adanya perbandingan belanja daerah dan produk domestik regional bruto yang mempengaruhi PAD.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alam S. 2007. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI*. Jilid 2. Jakarta: Esis. Hlm. 70–71.

Andi. Hanafi, M M. dan A. Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 3. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi No.3 Tahun ke-1 (online) (<http://olam.ed.asu.edu/epaa/>, Diakses 09 Desember 2010).

Barlian, R.S. 2003. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kelima. Cetakan Kedua.

 Yogyakarta: Literata Lintas Media.

Belkaoui, Ahmed, dkk. 2004. *Teori Akuntansi*. Edisi Kedua. Jakarta : Erlangga.

Darmadji, T dan Fakhrudin M.H. 2006. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.

Darsono, A. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta:

Ernawati. 2003. *Pengukuran Kinerja Perusahaan Ditinjau dari Analisis Rasio Keuangan*, Skripsi. Fakultas Ekonomi UMS, Tidak Dipublikasikan.

Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: ALFABETA

Harahap, S S. 2004. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Cetakan Keempat.

Rajawali Pers. Jakarta.

\_\_\_\_\_\_. 2008. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.

Husnan, Suad. 2003. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* EdisiKetiga. Yogyakarta: BPFE.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba

Empat.

Indah Kurniawati. 2001. Perbandingan Rasio-Rasio Keuangan pada Perusahaan

Besar dan Perusahaan Kecil Di Malaysia, Singapura, dan Taiwan. *Jurnal*

*Akuntansi dan Bisnis.* Vol. 1, No. 1 : 13 – 23.

Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Pertama*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Jurnal internasional. ([www.googlecendikia.com](http://www.googlecendikia.com), Diakses pada : 10 maret 2017).

Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mabruroh. 2004. *Manfaat dan Pengaruh Rasio Keuangan dalam Analisis Kinerja Keuangan Perbankan*. Benefit. Vol. 8, No. 1 : 37 – 51.

Mamduh M. Hanafi. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kedua. Yogyakarta:

UPP AMP YKPN.

Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis dan*

 *Aplikatif.* Refika Aditama. Bandung.

Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Cetakan Keempat

 Belas. Liberty. Yogyakarta.

*Menteri Keuangan Republik Indonesia*. 1992. Surat Keputusan Menteri Keuangan

 Republik Indonesia Nomor : 826/KMK.013/1992. Tentang Sistem Penilaian Kinerja BUMN.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan,* Edisi Pertama.

Yogyakarta: BPFE.

Munawir, S. 2012. *Analisis Informasi Keuangan*, Liberty, Yogyakarta.

Myer. 2013. Financial Stament Analisis. *Jurnal internasional*, (online), (http://www..malang.ac.id, Diakses 14 Maret 2017).

Prastowo, D. dan R. Juliaty. 2008. *Analisa Laporan Keuangan*, Konsep dan

 Aplikasi. Edisi 2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Retno Tri Setyowati. 2008. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Perusahaan Consumer Goods, Skripsi. Fakultas Ekonomi UMS, Tidak Dipublikasikan.

Rusdin. 2008. *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik*. Bandung: ALFABETA

Saifuddin, Azwar. 1998. *Metode Penelitian.*  Yogyakarta : Pustaka pelajar.

Situmorang, Paulus. 2008. *Pengantar Pasar Modal, Edisi Pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta :

Lembaga Penerbit FE.UI

Syamsuddin. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Erlangga.

Srimindarti, C. 2006. *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk MengukurKinerja*, STIE Stikubank, Semarang.

Sucipto, Muh. 2003. *Analisis Kinerja Keuangan*. Jakarta : Kencana

Sukhemi. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan*. Semarang. UNES

Sunariyah. 2006. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Kelima*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekonisia,

Yogyakarta.

Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*. 1995. PT Remaja Kosdakarya.

Bandung.

Tandelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi

 Pertama. Yogyakarta: BPFE.

URL[http://menarailmuku.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-jenis-jenis-pasar modal.html](http://menarailmuku.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-jenis-jenis-pasar%20modal.html). Diakses 1 januari 2017,

(ASI;2012. (http://www.kemenperin.go.id/) Diakses 1 januari 2017,

Wild, J. John, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey. 2010. *Analisis Laporan*

 *Keuangan.* Edisi Delapan, Jakarta : Salemba Empat.

(*online*) ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), Diakses 09 Mei 2017).

(*online*) ([www.sekolahpasarmodal.co.id](http://www.sekolahpasarmodal.co.id), Diakses 09 Mei 2017).